

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya Masyarakat Informasi (Information Society) atau Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based Society).

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Provinsi Jambi juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK provinsi juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Jambi TUNTAS 2021, pada visi ke satu dan ke empat.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2021, berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 dan bersifat indikatif, sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 Bab IV Pasal 26, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, sampai ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai *e-Government*, dan diamanatkan dalam bentuk konsep Jambi *Cyber Province*.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini, sebagai acuan umum tentang arah pembangunan TIK. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Kabupaten/Kota serta mensinergikan pembangunan TIK di Provinsi Jambi dengan

pembangunan TIK Nasional dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan kebijakan teknis Dinas Kominfo dengan tetap memiliki korelasi dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi, agenda serta visi dan misi Provinsi Jambi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Selain itu Renstra ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi, dalam menjalankan berbagai fungsinya. Dinas Kominfo sebagai salah satu unsur dinas berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informatika tersebut, termasuk dalam pelayanan barang/jasa publik melalui LPSE.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi kominfo, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 s/d 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor4700);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor5038);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor5149);
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangane-*Government*;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor8);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Jambi dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)

setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;

- b. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Provinsi Jambi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang:

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kominfo, fungsi Renstra Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah, proses penulisan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota serta Renja OPD

Landasan Hukum:

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penulisan Renstra Dinas Kominfo.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kominfo serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan Dinas Kominfo.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi serta Renstra Kabupaten/Kota; telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup; penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah; serta strategi dan kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Jambi.

BAB V STRATEGI DANARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAMSERTA PENDANAAN.

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

2.1.1. Struktur Organisasi

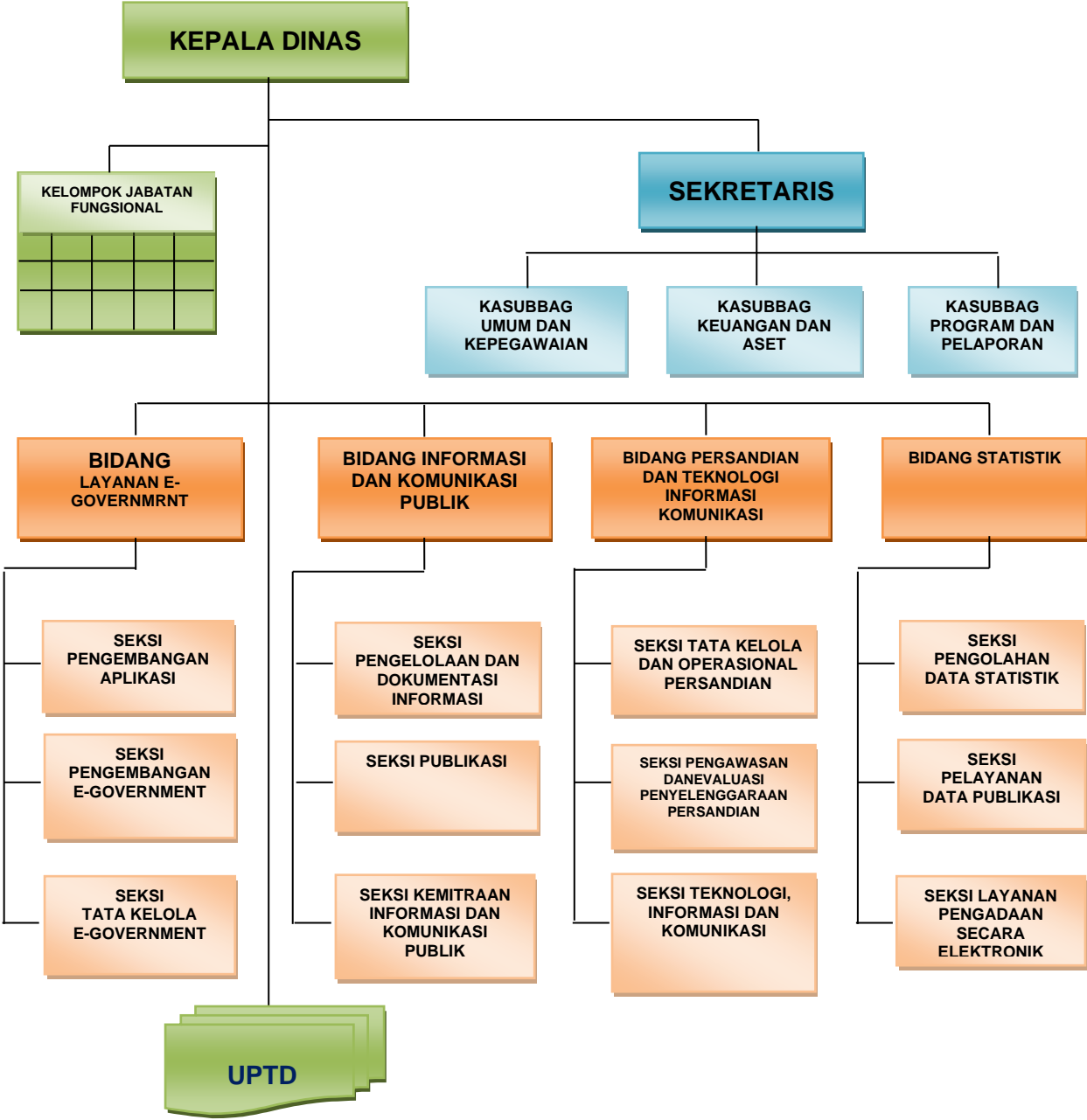
Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Dinas Kominfo terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), empat orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 orang Kepala Subbagian/Seksi (Eselon IV).

2.1.2. Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang layanan *e-government*, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 2. Seksi Pengembangan *e-government*; dan
 3. Seksi tata kelola *e-government*.
- d. Bidang informasi dan komunikasi publik, terdiri dari:
 1. Seksi pengelolaan dan dokumentasi informasi;
 2. Seksi publikasi; dan
 3. Seksi kemitraan informasi dan komunikasi publik.
- e. Bidang Persandian dan teknologi informasi komunikasi, terdiri dari:
 1. Seksi tata kelola dan operasional persandian;
 2. Seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian; dan
 3. Seksi teknologi, informasi dan komunikasi.

- f. Bidang Statistik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan data statistik;
 - 2. Seksi Pelayanan data dan publikasi; dan
 - 3. Seksi Layanan pengadaan secara elektronik.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 menyatakan bahwa Dinas Kominfo Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Daerah (Gubernur) melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pelaksanaan pembinaan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Berikut ini adalah Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkup Dinas.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sekretariat membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan urusan persuratan, rumah tangga, tata usaha pimpinan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan urusan dalam, pengamanan dan administrasi perjalanan dinas;
 - d. pelaksanaan tata usaha pimpinan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan usulan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai;
 - f. penyiapan bahan sasaran kinerja pegawai dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - g. penyiapan bahan pengelolaan administrasi jabatan fungsional;

- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas;
- i. penyiapan bahan penetapan, pengangkatan dan mutasi pegawai lainnya serta penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan laporan di bidang keuangan dan pengelolaan urusan barang milik daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. pengelolaan urusan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai di lingkup dinas;
 - c. pengelolaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik daerah;
 - d. pengelolaan urusan barang persediaan;
 - e. penyiapan bahan inventarisasi, penerimaan, pengeluaran, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sub Bagian Program dan Pelaporan

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan, pengelolaan dan penyajian data;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Layanan *E-Government*

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* serta tata kelola *e-government*.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Layanan *E-Government* mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*.
 - c. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pembangunan, pengembangan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*.
 - d. Pelaksanaan pengembangan sumber daya teknologi informatika dan komunikasi;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*.
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*.
 - g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahkan:

- a. Seksi pengembangan aplikasi;
- b. Seksi pengembangan *e-government*; dan
- c. Seksi tata kelola *e-government*.

A. Seksi Pengembangan Aplikasi

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan dibidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi.
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi.
 - d. Penyisipan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi.
 - e. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Pengembangan *E-Government*

- (1) Seksi Pengembangan *E-Government* mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan teknologi informasi komunikasi, smart provinsi, layanan nama domain/sub domain bagi lembaga dan pelayanan publik..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan *E-Government* menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart provinsi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart Provinsi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik
 - c. Penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi. Smart provinsi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik

- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart provinsi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik.
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart provinsi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Tata Kelola *E-Government*

- (1) Seksi Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tatakelola pemerintahan (*e-government*) *government chief Information officer*, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan dan masyarakat..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Kelola *E-Government* menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (*e-goverment*) *government chief Information officer*, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan dan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pemerintahan, pengembangan sumberdaya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat.
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat.
 - d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat.
 - e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola pemerintahan, pengembangan sumberdaya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang informasi dan komunikasi publik

Bidang Bidang informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media dan pengembangan sumberdaya komunikasi publik di provinsi.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Bidang informasi dan komunikasi publik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah.
 - b. Perumusan kebijakan, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
 - c. Perumusan kebijakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media.
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi dan komunikasi publik.
 - e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
 - f. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
 - g. Penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media.
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah.
 - i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
 - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media.
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik membawahkan:
- a. Seksi pengelolaan dan dokumentasi informasi;
 - b. Seksi publikasi; dan
 - c. Seksi kemitraan informasi dan komunikasi publik.

A. Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi

Seksi Layanan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan opini/aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, penyediaan akses informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi pengelolaan dan dokumentasi informasi menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan prioritas dalam bentuk Renja, RKA, DPA
- (2) Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi.
- (3) Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan informasi.
- (4) Penyediaan pengelolaan informasi , opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
- (5) Penyiapan bahan penyediaan konten lintas sektoral.
- (6) Penyiapan bahan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- (7) Penyiapan bahan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik.
- (8) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah.
- (9) Penyediaan konten informasi dan dokumentasi lintas sektoral.
- (10) Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pengelolaan dan dokumentasi informasi
- (11) Pelaksanaan pemantauan terhadap update informasi website perangkat daerah.
- (12) Pembuatan media informasi pembangunan daerah.
- (13) Menyiapkan bahan dokumentasi untuk publikasi informasi.
- (14) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pendokumentasian dan pengarsipan.

- (15)Penyiapan bahan oordnasi danpengawasan terhadap kegiatan dokumentasi di daerah.
- (16)Pendokumentasian kebijakan pemerintah danhasil pembangunan daerah.
- (17)Pelaksanaan pemeliharaan terhadap media dokumentasi (kamera, camcorder, peralatan studio, dsb) dan media informasi (baliho, running text board, dsb)
- (18)Pelaksanaan tugas – tugas kesekretariatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi provinsi Jambi (PPID Utama)
- (19)Penyusunan laporan seksi
- (20)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Publikasi

- (1) Seksi Publikasi mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyebaran informasi,pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pelaksanaanpemantauan,evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan media komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Publikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan kegiatan di Biadang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan Prioritas dalam bentuk Renja, RKA dan DPA.
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan media komunikasi publik.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyebaran informasi melalui media massa dan lembaga/komunitas/kelompok masyarakat.
 - d. Penyiaoaan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan pembuatan media komunikasi publik.
 - e. Penyiapan bahan pengelolaan dan pembuatan media komunikasi publik.
 - f. Penyiapan bahan penyebaran informasi melalui media massa dan lembaga/komunitaas/kelompok masyarakat.
 - g. Pengelolaan media publikasi dan komunikasi publik.
 - h. Penyiapan bahan enyusunan program dan kegiatan penyebarluasan informasi.
 - i. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
 - j. Penyiapan bahan penyelenggaraan penyebarluasan informasi pemerintah provinsi dengan menggunakan sarana komunikasi

seperti media massa cetak/elektronik, media sosial, media tradisional, media internasional. Media luar ruang dan prasarana lainnya.

- k. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dan publikasi.
- l. Penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan publikasi di daerah.
- m. Pelaksanaan publikasi hasil kajian informasi kepada publik dan lembaga terkait.
- n. Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penyebaran informasi pembangunan daerah.
- o. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan daerah.
- p. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan pembuatan media komunikasi publik.
- q. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana publikasi.
- r. Pelaksanaan dan pengelolaan media center serta kegiatan jumpa pers.
- s. Pelaksanaan perawatan terhadap sarana media center
- t. Penyusunan laporan seksi.
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan layanan hubungan media pelaksanaan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kelembagaan informasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan prioritas dalam bentuk Renja, RKA, DPA.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
 - c. Penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang kelembagaan informasi publik pemerintah daerah provinsi.
 - d. Penyiapan bahan layanan hubungan media.
 - e. Penyiapan bahan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

- f. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan lembaga komunikasi sosial dan masyarakat serta hubungan kemitraan dengan media massa.
- g. Pelaksanaan literasi media.
- h. Penyiapan bahan pengelolaan keterbukaan informasi publik.
- i. Pemberian dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi daerah.
- j. Penyiapan bahan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.
- k. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- l. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi konsultasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- m. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- n. Pelaksanaan bimbingan teknis dokumentasi dan arsip di bidang keterbukaan informasi publik.
- o. Pelaksanaan bimbingan teknis standar layanan informasi publik daerah.
- p. Pelaksanaan bimbingan teknis jurnalistik.
- q. Pelaksanaan bimbingan teknis SDM komunikasi publik.
- r. Penyiapan bahan layanan kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta non pemerintah.
- s. Penyusunan laporan seksi.
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Persandiandan Teknologi Informasi Komunikasi

Bidang Persandiandan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan perumusan, kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan operasional persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan teknologi informasi komunikasi.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Persandian dan teknologi Informasi Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, keamanan informasi dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, keamanan informasi dan persandian;

- c. perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi komunikasi.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Persandian dan teknologi Informasi Komunikasi membawahkan:

- a. Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian
- b. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian, dan
- c. Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

A. Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian

(1) Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan tata kelola dan operasional persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi.
- c. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi.
- d. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi.
- e. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah.
- f. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi.
- g. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah.
- h. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi.
- i. Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi.
- j. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar.
- k. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar.

- l. Pengadaam, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras.
- m. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi.
- n. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi.
- o. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota dilingkungan provinsi.
- p. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota dilingkungan provinsi.
- q. Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasisandi antar perangkat daerah dan antar kabupaten/kota dilingkup provinsi.
- r. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota dilingkungan provinsi.
- s. Pengkoordinasian pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Provinsi dan antar kabupaten/kota dilingkungan provinsi.
- t. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya.
- u. Pengamanan informasi elektronik.
- v. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.
- w. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Persandian

- (1) Seksi Pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dilingkungan pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Persandian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian.
 - b. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar

perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota dilingkungan provinsi.

- c. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi.
- d. Penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumber daya persandian.
- e. Penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota dilingkungan provinsi.
- f. Penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan operasional pengamanan komunikasi sandi.
- g. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkup provinsi.
- i. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Teknologi, informasi dan komunikasi

- (1) Seksi teknologi, informasi dan komunikasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan, kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi teknologi, informasi dan komunikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan rumusan dan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi.
 - b. Penyiapan infrastruktur data center *disaster recovery center*.
 - c. Penyiapan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengimplementasikan *e-government*.
 - d. Penyiapan infrastruktur *cloud computing* dalam mendukung *good government*.

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi.
- f. Penyiapan sarana interoperabilitas system informasi melalui *application protocol interface* daerah.
- g. Penyiapan sarana inter konektivitas layanan publik dan ke pemerintahan.
- h. Penyiapan sarana akses internet dan intranet pada pemerintah daerah dan publik.
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Statistik

Bidang statistik mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi, infrastruktur, sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia, pelayanan data dan publikasi dan layanan pengadaan secara elektronik.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sektoral.
- b. Perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik pelayanan data dan publikasi.
- c. Perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengadaan secara elektronik.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Bidang Statistik membawahkan:

- a. Seksi pengolahan data statistik;
- b. Seksi pelayanan data dan publikasi; dan
- c. Seksi layanan pengadaan secara elektronik.

A. Seksi Pengolahan Data Statistik

- (1) Seksi pengolahan data statistik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sektoral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi pengolahan data statistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaporan dan evaluasi di bidang statistik sektoral.

- b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
- c. Pelaksanaan pengolahan, verifikasi/validasi, pemeliharaan data spasial dan a-spasial pembangunan provinsi jambi.
- d. Penyiapan bahan analisa data statistik sektoral.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Pelayanan Data dan Publikasi

- (1) Seksi pelayanan data dan publikasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan data dan publikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi pelayanan data dan publikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan.
 - b. Pelaksanaan layanan data dan pembangunan daerah.
 - c. Pelayanan publikasi data melalui penerbitan buku, bulletin, *booklet*, dan *leaflet*.
 - d. Pelaksanaan publikasi statistik sektoral melalui media cetak dan elektronik.
 - e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan data dan publikasi.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- (1) Seksi layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi layanan pengadaan secara elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan secara teknis operasional dibidang layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
 - d. Pengolahan ketatausahaan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing - masing.
- b. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing – masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.
- d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.3 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Sumber daya Dinas Kominfo dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi :

2.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dinas memunculkan konsekuensi diperlukannya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidang teknologi informasi, baik di tingkat pengguna, pengelola maupun pimpinan. Keterbatasan SDM merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangan *e-government* menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi sistem informasi dan telematika, diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana sistem bidang teknologi informasi.

Tabel 2.1

A. REKAPITULASI PEGAWAI PER GOLONGAN (Data Tahun2018)

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH	PERSEN (%)
1 .	IV c		
2 .	IV b	5	-
3 .	IV a	5	-
4 .	III d	15	-
5 .	III c	13	-
6 .	III b	12	-
7 .	III a	4	-
8 .	II d	1	-
9 .	II c	1	-
10 .	II b	1	-
11.	II a	-	-
12 .	I d	-	-
13 .	I c	-	-
14 .	I b	-	-
15 .	I a	-	-
	JUMLAH	57	100,00

Tabel 2.2

B. REKAPITULASI PEGAWAI PNS dan CPNSBERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL (Data Tahun2018)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSEN (%)
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMA	7	-
4.	D.4	-	-
5.	D.3	5	-
6.	S.1	33	-
7.	S.2	12	-
8.	S.3	-	-
JUMLAH		57	100,00

2.3.2 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Tabel 2.3

A.KONDISI INFRASTRUKTURDASAR PELAYANAN PUBLIK.

NO.	NAMA PERALATAN	OPERASIONAL	LOKASI
1.	17 (tujuh belas) Unit Server Aktif dan Kelengkapannya	Yang diperuntukan : 3 (tiga) Unit Server Website Jambi Prov.go.id, Website OPD dan Server LPSE	Dinas Kominfo Provinsi Jambi
2.		1 (satu) Unit Server Aplikasi A. Aplikasi Kepegawaian dan Penggajian B. Aplikasi e-Office <ul style="list-style-type: none">- Surat Menyurat- Perjalanan Dinas- Undangan- Kasus Batas Wilayah C. Aplikasi Situation Room <ul style="list-style-type: none">- Infrastruktur- Pendidikan- Kesehatan- Pertambangan dan Energi- Kebudayaan dan Pariwisata D. Aplikasi Potensi Produk Unggulan <ul style="list-style-type: none">- Perkebunan- Pertanian- Perikanan- Peternakan- Pertambangan- Infrastruktur- Investasi dan Penanaman Modal- Perindustrian dan Perdagangan- Pemerintahan	
		E. Aplikasi e-Planning F. Aplikasi e-SAMSAT G. Aplikasi Dinas Koperasi dan UKM H. Aplikasi Produk Hukum I. Aplikasi e-SAKIP J. Aplikasi LPSE K. Aplikasi Realisasi Lelang LPSE L. Aplikasi Perizinan Kab./Kota. M. Aplikasi Dinas Perkebunan. N. Aplikasi Dinas Kelautan & Perikanan	

NO.	NAMA PERALATAN	OPERASIONAL	LOKASI
		O. Aplikasi Dinas Peternakan & Keswan P. Aplikasi Dinas Pertambangan Q. Aplikasi DinasPerindag.	
3.		1 (satu) Unti Server Situation Room	
6.		1 (satu) Unit Server LPSE	
7.		1 (satu) Unit Server Handkey	
8.		1 (satu) Unit Server LPPK	
9.		1 (satu) Unit Server Backup	
10.		1 (satu) Unit Server E-Mail	
14.	Alokasi dan Penempatan Server Kab./Kota se Prov. Jambi	2 (dua) Unit Server LPSE dan DATACENTER Kab.Merangin 2 (dua) unit Server DATACENTER Sungai Penuh 2 (dua) Unit Server Dinas PU Provinsi Jambi. R. Server Website Dinas PU Provinsi Jambi S. Server GPS PU (ALKAL) Provinsi Jambi	Dinas Kominfo Provinsi Jambi
15.	Bandwidth	Sewa Bandwidth 500Mbps yang berguna untuk akses internet/Intranet ke seluruh OPD lingkup Pemprov.Jambi	Dinas Kominfo Provinsi Jambi
16.	Infrastruktur Jaringan Internet/ Intranet Fasilitas Internet/ Intranet OPD	Terkoneksinya jaringan internet/intranet melalui Cabel FO dan Radio Link Akses Internet gratis yang menggunakan Bandwidth Dari Dinas Kominfo Provinsi Jambi	OPD,Rumah Dinas Gub, Wagu & Sekda OPD,Rumah Dinas Gub, Wagu & Sekda
17.	Fasilitas Wifi OPD	Akses internetgratis melalui Wifi (Hotspot Area) Yang dipasang di seluruh OPD	OPD,Rumah Dinas Gub, Wagu & Sekda
18.	Handkey	Berjalan dengan baik dan terkoneksi dari seluruhOPD ke BKD dan Dinas Kominfo Prov.Jambi	Seluruh OPD Dan UPTD

NO.	NAMA PERALATAN	OPERASIONAL	LOKASI
19.	Transponder	Sewa satelit Telkom yang berguna memberikan aksesSiaran TVRI Jambi dan TV Lokal Jambi sampai ke Desa-desa terpencilDalam Provinsi Jambi, antar Provinsi bahkan Mancanegara dengan menggunakan Media Parabola.	DINAS KOMINFO, TVRI Jambi, dan Telkom.

Tabel 2.4

2.3.3 SUMBER DAYA PENUNJANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1.	Meja Biro	7	1 Rusak berat	
2.	Meja ½ Biro	57	1 Rusak berat	
3.	Meja Kerja	11	Baik	
4.	Meja Rapat	7	Baik	
5.	Meja Komputer	30	Rusak Ringan	
6.	Kursi Biro	2	Baik	
7.	Kursi Putar	24	Baik	
8.	Kursi Kerja	14	Rusak Berat	
9.	Kursi Rapat	18	Baik	
10.	Kursi ½ Biro	60	Baik	
11.	Kursi Tamu	4	Baik	
12.	Filling Kabinet	38	Baik	
13.	Lemari Besi	6	Baik	
14.	Lemari Kaca	2	Baik	
15.	Lemari Kayu	3	Baik	
16.	Lemari Server	2	Baik	
17.	Projektor	6	Baik	
18.	Layar Projektor	2	Baik	
19.	Komputer PC	46	Baik	
20.	Laptop	35	3 Rusak Ringan	
21.	Printer Besar	2	1 Rusak Berat	
22.	Printer	25	Baik	
23.	Tower	14	Baik	
24.	Genset	2	Baik	
25.	AC	35	4 Rusak Berat	
26.	Brankas	2	Baik	
27.	LCD TV 70"	1	Baik	
28.	Mesin Cetak ID CARD	1	Baik	
29.	Kamera	5	Baik	
30.	Handy Cam	2	1 Rusak Berat	
31.	TV Tunner	4	3 Rusak Berat	
32.	UPS	24	Baik	
33.	Server	29	10 Rusak Berat	
34.	IP Phone	7	Baik	
35.	Mesin Poto Copy	1	Baik	
36.	Handkey	62	10 Rusak Berat	

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jambi meliputi:

- A. PENERAPAN TATA KELOLA TIK** dalam hal ini Pemeringkatan *E-Government* merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah
 2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
 3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi pada khususnya dan secara nasional pada umumnya.
- B. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)** dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.
- C. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK** merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan *e-government* dan layanan publik;
- D. APLIKASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)** merupakan layanan yang diberikan guna memfasilitasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan pelelangan Barang/Jasa Pemerintah dengan Sistem Elektronik.
- E. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)** merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.
- F. MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT (PERTUNRA)** merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat.
- G. MEDIA ON-LINE** merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.jambiprov.go.id dan www.diskominfo.jambiprov.go.id;
- H. MAJALAH DINAS KOMINFO** merupakan salah satu media penyebaran informasi bagi masyarakat dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk

penerbitan Majalah Kominfo. Khalayak sasarannya OPD, Kabupaten/Kota, dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Jambi.

- I. **BUKU PINTAR DINAS KOMINFO** merupakan salah satu media penyebarluasan informasi bagi masyarakat dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk penerbitan Buku Pintar Kominfo. Khalayak sasarannya OPD, Kabupaten/Kota, dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Jambi.
- J. **DESA INFORMASI** merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi, dimana yang menjadi khalayak sasarannya adalah Desa yang mempunyai keunggulan dan mendukung kegiatan Pemerintah Provinsi.
- K. **FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
- L. **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika
Provinsi Jambi

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS FUNGSI DINAS KOMINFO	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN						RASIO CAPAIAN TAHUN					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	80%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi			Persentase titik akses infrastruktur jaringan internet dan intranet	45%	55%	65%	70%	75%	100%	55%	70%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase titik akses penggunaan internet wifi	70%	75%	80%	90%	100%	100%	62%	62%	95%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
3.	Mengoptimalkan Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	-	-	Persentase Layanan Penggunaan LPSE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Mengoptimalkan Fasilitasi kegiatan Komisioner Informasi Publik dan Penyiaran	-	-	Persentase Fasilitasi Kegiatan KIP dan KPID	45%	50%	55%	60%	65%	70%	50%	55%	65%	70%	75%	85%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS FUNGSI DINAS KOMINFO	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN						RASIO CAPAIAN TAHUN					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.	Mengoptimalkan penggunaan system aplikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	-	-	Persentase aplikasi dan website yang dibangun guna mendukung kegiatan di lingkup Pemerintah Provinsi	43%	43%	62%	68%	73%	78%	45%	45%	60%	70%	70%	80%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Presentase penggunaan aplikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	45%	45%	50%	55%	65%	75%	45%	45%	55%	60%	80%	85%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat Melalui Berbagai Media	-	-	Persentase layanan Persandian Pengamanan Informasi	25%	30%	45%	65%	80%	100%	25%	30%	45%	65%	80%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	80 %	85 %	87 %	91 %	92 %	95 %	90 %	90 %	95 %	95 %	96 %	97 %	10%	10%	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Mengoptimalkan Penerapan e- Government di Provinsi Jambi	-	-	Jumlah konektivitas penggunaan system aplikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi													100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Uraian program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata – rata	pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.888.592.000	4.871.001.700	5.705.525.000	6.018.775.000	6.560.464.750	7.150.906.577	4.840.092.873	4.851.000.000	5.700.000.000					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.208.280.000	1.030.300.000	3.589.470.000	1.404.715.500	1.578.125.000	1.625.031.000	1.194.057.000	1.010.000.000	3.589.000.000					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	78.000.000	105.000.000	150.000.000	155.000.000	160.000.000	165.000.000	78.000.000	104.000.000	150.000.000					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	109.800.000	117.281.600	175.000.000	200.000.000	250.000.000	275.000.000	74.655.000	105.000.000	170.000.000					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	675.000.000	745.000.000	820.000.000	950.000.000	-	-	670.000.000					
Program Pengembangan Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Masa	1.042.090.000	-	-	-	-	-	925.573.900	-	-					
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	991.885.000	-	-	-	-	-	952.461.800	-	-					
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	1,493,558,000	-	-	-	-	-	1.240.102.313	-	-					
Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	528,585,000	-	-	-	-	-	430.459.250	-	-					
Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan	-	850.726.000	2.303.226.000	2,534.043.600	2.762.107.525	3.038.318.276	-	850.000.000	2.300.000.000					
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	4.124.213.000	5.249.000.000	5.249.000.000	5.773.900.000	6.754.000.000	-	4.120.000.000	5.240.000.000					
Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika	-	1.134.927,600	1,750.000.000	1.925.000.000	2.098.250.000	2.287.092500	-	1.130.000.000	1.730.000.000					

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif.

Sebagaimana dijelaskan di awal, pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi secara umum dikatakan sudah memenuhi harapan masyarakat. Namun, seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks. Hal ini tentunya berimplikasi pada perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin canggih. Kemajuan tersebut seyogyanya harus mampu direspon oleh Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika. Namun, berbagai permasalahan dan kendala kerap dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelaraskan kemampuan/kapasitas yang dimilikinya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kemampuan itu tentunya harus berorientasi pada pelayanan informasi yang memuaskan dengan terus berupaya merespon keinginan dan harapan publik dengan menghadirkan program dan kegiatan yang relevan, efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, murah dan akuntabel dengan memperhatikan dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.

2.5.1 Ada beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam upaya pengembangan pelayanan OPD,di antaranya :

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah di Jambi yang mengarah kepada “daya saing”.
- b. Pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor belum maksimal, baik dalam lingkup OPD, Kabupaten / Kota maupun masyarakat, khususnya dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).
- c. Pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan pengembangan TIK masih rendah, khususnya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.

- d. Sikap proaktif masyarakat terhadap pengembangan dan pemberdayaan TIK belum optimal.

2.5.2 Selain tantangan yang ada, terdapat juga peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam upaya pengembangan pelayanan informasi, seperti :

- a. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai Pusat Data (d a t a c e n t e r) dalam pengelolaan teknologi informasi di Pemerintah Provinsi Jambi dan sekaligus diharapkan sebagai konsultan perencanaan Bidang Komunikasi dan Informatika bagi Pemerintah Kabupaten / Kota;
- b. Memanfaatkan jaringan komunikasi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai modal utama dalam percepatan arus pertukaran dan diseminasi informasi antar OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti: Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Akses Internet dan Intranet;
- c. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan TIK mulai berkembang yang diharapkan dapat mendongkrak “daya saing” perekonomian Jambi;
- d. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.

Di balik tantangan yang ada, terdapat juga peluang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam upaya pengembangan pelayanan dasar (minimal), sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Permenkominfo RI) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota memberikan harapan baru dalam peningkatan pelayanan informasi publik.

Upaya merealisasikan harapan dan peluang tersebut tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Dibutuhkan kemampuan SDM yang handal dan kompeten di bidang komunikasi dan informatika. Selain itu, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung sangat dibutuhkan, antara lain gedung / kantor yang representatif, peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk menunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan internet.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi OPD dalam satu Network Operating Center (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Masyarakat serta Stakeholder untuk mengakses data dan informasi dari pusat data di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi melalui komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarluaskan informasi yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan semua pihak, khususnya

aparatur menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jambi merencanakan optimalisasi pembangunan, pengelolaan dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemberdayaan masyarakat tetap menjaga dan mempertimbangkan dari aspek prioritas pembangunan daerah, menyeluruh, merata, seimbang dan tetap menjaga kondusivitas keberagaman.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang dicapai melalui program dan kegiatan yang relevan berdasarkan visi dan misi Gubernur Jambi periode Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagaimana diuraikan dalam lampiran Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Adapun kondisi yang diinginkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah :

1. Menjadikan lokal government (pemerintah Provinsi Jambi) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database daerah dimana semua lembaga / institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu Network Operating Center (NOC);
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan;
3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika dengan sasaran aparatur pemerintah Provinsi Jamb, swasta, dan masyarakat serta komunitas di Provinsi Jambi;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana telematika pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi secara berkesinambungan;
6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai tingkat kabupaten/kota sehingga penjangkauan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien;
7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
8. Adanya pengembangan Informasi dan Komunikasi melalui kemitraan media massa;

9. Adanya pembinaan dan pengembangan Media Tradisional di seluruh kab/kota se-Jambi secara berkesinambungan untuk memantapkan diseminasi informasi kepada masyarakat;
10. Adanya pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lumbung informasi bagi Pemerintah Provinsi di Kabupaten / Kota berbasis IT;
11. Pengembangan konten website Pemerintah Provinsi Jambi yang meliputi Aplikasi Sistem Informasi OPD, baik internet maupun intranet;
12. Pengembangan implemementasi e-goverment di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
13. Adanya regulasi berupa Peraturan Gubernur Jambi yang memberi kepastian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informatika dan di dalamnya terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti mengenai tata cara infrastruktur dibangun, prosedur aplikasi dibangun untuk kemudian digunakan sebagai pengelolaan data online, termasuk juga perencanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di Provinsi Jambi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 5 (lima) tahun ke depan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional dibidang Teknologi informasi dan komunikasi.
2. Belum optimalnya pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet yang telah dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
3. Terbatasnya Sumberdaya Aparatur yang trampil dan profesional dibidang pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
4. Belum optimalnya fasilitasi kegiatan Komisioner Informasi Publik dan Komisioner Penyiaran.
5. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi dan Website yang telah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
6. Belum optimalnya pemanfaatan website yang telah dibangun Dinas Kominfo Provinsi Jambi oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Belum optimalnya upaya pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat.
8. Belum optimalnya penerapan E-Government di Pemerintah Provinsi Jambi.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan SDM Aparatur di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			Bimbingan Teknis yang bersertifikasi guna meningkatkan Kopetensi Aparatur di Bidang TIK		Belum Optimalnya Jumlah SDm yang memiliki kopetensi di Bidang TIK
	Jumlah pegawai dengan kompetensi Teknis yang terbatas		Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai	Kebijakan Penempatan Pegawai	Masih kurangnya pegawai secara kualitas dan kuantitas
Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi	Telah terbangun WIFI di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi		Belum maksimalnya pelayanan terhadap penggunaan WIFI di OPD		Belum optimalnya dukungan dana/anggaran
	Website OPD Prov. Jambi dan kab/ko ta sebanyak	Belum ada Pergub yang menjadi acuan/SOP	Perlu membentuk Kepgub/Pergub Jambi untuk dijadikan payung hukum dalam pengembangan dan muatan di website		Unit kerja di Kab/kota masih banyak yang belum memiliki website
Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Paket lelang (konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya) sudah mencapai 100% kecuali jasakonsultasi	1.UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2.UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3.Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya	Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya komitmen pimpinan daerah kab/kota tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik; - tidak adanya sanksi yang secara tegas mengharuskan pemanfaatan LPSE - Kebijakan Gubernur; komitmen OPD, Pengusaha dan LKPP 	Belum optimalnya dukungan dana/anggaran
	Lelang Jasa Konsultansi dilaksanakan tahun 2011		Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE		<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek jasa konsultansi masihterbatas; - Aplikasi SPSE dariLKPP
	Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar di LPSE Provinsi Jambi sudah mencapai 8359 (tahun 2016)		Sosialisasi, Bimtek, dan Verifikasi	Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Vertikal yang bergabung ke LPSE Jambi	Kekurangan tenaga verifikator, Trainer. Admin dan Helpdesk

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fasilitasi Kegiatan Komisioner Informasi Publik dan Komisioner Penyiaran	1. Telah terselesaikannya sengketa publik oleh KIP. 2. Layanan Rekomendasi Kelengkapan Administrasi dan Teknis Penyiaran	1. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 61/2010 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Informasi Provinsi dan Kab/Kota Keputusan Menkominfo No. 18/2008 tentang Tata Cara Proses Rekomendasi Perijinan Penyiaran di Daerah			
Pemanfaatan Aplikasi yang telah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi)					Belum maksimalnya pemanfaatan Aplikasi dan Websitet yang telah dibangun oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi
pemberdayaan potensi komunikasimas yarakat.			Pembentukan KIM bukan merupakan kewenangan Dinas Kominfo Provinsi karena KIM tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat	Pembentukan KIM merupakan kewenangan dari Pemerintah kabupaten/kota	Belum optimalnya peran KIM di daerah dan belum optimalnya pembinaan KIM oleh Diskominfo Prov.Jambi
penerapan E-Government (aplikasi dan website) di Pemerintah Provinsi Jambi.	Telah terbangunnya aplikasi dan website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi		Jumlah Aplikasi dan Website yang mendukung kegiatan dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi		Belum optimalnya dukungan dana/anggaran

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam Perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka visi pembangunan yang ingin diwujudkan periode 2016-2021, adalah :

**“Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera”
(JAMBI TUNTAS 2021)**

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Tertib**

: Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkat pemerintahan dari pusat sampai desa.
- Unggul**

: Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman**

: Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tentram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar suku, agama, dan ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh**

: Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang

mampu bertahan terhadap goncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.

- Adil** : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya Misi.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

- Misi Satu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif yang berorientasi pada Pelayanan Publik**, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
- Misi Dua : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamais, dan Berkesetaraan Gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
- Misi Tiga : Menjaga Situasi Daerah yang Kondusif, Toleransi antar Umat Beragama dan Kesadarn Hukum Masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.
- Misi Empat : Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang di dukung oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) Berwawasan Lingkungan**, yaitu

meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.

Misi Lima : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Umum, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk dan antar wilayah.

Misi Enam : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, menempatkan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika terutama untuk mendukung Misi 1 (satu) yaitu : “ **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif yang berorientasi pada Pelayanan Publik**” dan Misi 4 (empat) yaitu : “**Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang di dukung oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) Berwawasan Lingkungan**”

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 1 dan ke 4 tersebut, maka Program Pembangunan khusus urusan Komunikasi dan Informatika yang akan dilakukan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib non pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika, melau program antara lain :

- a. Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Telematika.
- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (JAMBI TUNTAS 2021)				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik</p> <p>Misi 4 Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan Lingkungan</p>	<p>1. Masih terbatasnya infratraktur jaringan komunikasi dan Informatika dilingkup Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi</p> <p>2. Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program</p> <p>3. Masih terbatasnya infratraktur internet;</p>	<p>1. Penggunaan jalur infrastruktur komunikasi yang belum optimal di setiap OPD dilingkup Pemprov. Jambi</p> <p>2. Masih terbatasnya sarana akses TIK bagi Publik</p> <p>3. Belum dijadikan prioritas program</p>	<p>1. Adanya ketersediaan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan.</p> <p>2. Tersedianya Struktur Organisasi dan Tupoksi yang mendukung penyebaran informasi dan pengembangan TIK.</p> <p>3. Adanya kepedulian pimpinan terhadap pengembangan kinerja berbasis TIK.</p>
	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>4. Belum optimalnya pemasangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik OPD dan Utama</p> <p>5. Masih rendahnya kemampuan di Bidang TIK</p>	<p>4. Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak&Juknis) penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika</p>	<p>4. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur jaringan secara efektif dan efisien serta ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat yang terkoneksi secara online dilingkup Pemprov. Jambi menuju Jambi TUNTAS 2021</p>
2.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>1. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan rekomendasi perizinan penyelenggara penyiaran</p> <p>2. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi publik yang akurat, cepat, mudah dan merata.</p> <p>3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik.</p>	<p>1. Rendahnya motivasi aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam penguasaan komunikasi dan informatika</p> <p>2. Belum dijadikan prioritas program.</p> <p>3. Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi</p>	<p>1. Adanya kerjasama dengan komisioner KPID Prov. Jambi.</p> <p>2. Adanya kerjasama dengan LPP TVRI dan LPP RRI</p> <p>3. Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika.</p> <p>4. Adanya kerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Jambi.</p>
3.	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Telematika.	<p>1. Belum optimalnya kemampuan aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan website.</p> <p>2. Belum optimalnya OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi memanfaatkan aplikasi dalam penyajian data pembangunan.</p>	<p>1. Rendahnya motivasi aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan website.</p> <p>2. Rendahnya motivasi aparatur dalam penggunaan komunikasi dan informasi terutama dalam pemanfaatan aplikasi yang sudah ada.</p>	<p>1. Tersedianya website yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur, dunia usaha dan masyarakat untuk mendapatkan informasi.</p> <p>2. Tersedianya aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur di seluruh OPD lingkup Pemprov. Jambi.</p> <p>3. Adanya dukungan pimpinan terhadap pengembangan kinerja berbasis TIK.</p>

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra OPD Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

3.2.1 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019

Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Komunikasi dan Informatika. Tujuan pembangunan Komunikasi dan Informatika untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tersebut diatas, maka beberapa permasalahan yang dihadapi oleh OPD (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi) dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta faktor pembambat dan faktor pendorong dalam pelayanannya dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kominfo RI
 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Visi : “ Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui Pembangunan Kominfo Berkelanjutan, yang merakyat dan Ramah Lingkungan, dalam Komunikasi kerangka NKRI				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya dan tersebarnya Informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI	Masih Rendahnya Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kurangnya Koordinasi dalam Penyusunan Program dan Kegiatan	Adanya Kesamaan Fungsi dan Peran
2	Terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika yang optimal	1. Masih terbatasnya Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data dan Rendahnya Kemampuan Komunikasi dan Informatika Aparatur, Dunia Usaha dan Masyarakat 2. Masih Rendahnnya Dukungan Keberlanjutan Program	1. Keterbatasan Anggaran 2. Rendahnya Komitmen Pengelola Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Adanya Kesamaan Fungsi dan Peran
3	Tersedianya Standar Alat dan Standar Mutu Layanan serta Mekanisme Pengawasan yang Akuntabel pada Layanan Komunikasi dan Informatika	Belum adanya Standar Mutu Layanan dan Mekanisme Pengawasan	1. Belum ada Regulasi Pengawasan Layanan 2. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya	Kewajiban Perlindungan terhadap konsumen
4	Tersedianya Layanan Konten Informasi yang edukatif mencerahkan dan Memberdayakan Masyarakat	Keterbatasan Ketersediaan Data dan Anggaran	Belum ada SOP tentang Pengelolaan Data	1. Kebutuhan Data 2. Keterbukaan Informasi Publik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Tercapainya Peranserta Aktif Masyarakat dan Lembaga Komunikasi dalam Penyediaan , Penyebaran dan Pemanfaatan Informasi Edukatif, Mencerahka dan Memberdayakan Masyarakat	Belum Optimalnya Pemanfaatan Komponen Mitra Kerja Dinas Kominfo	1. Keterbatasan Anggaran 2. Rendahnya Komitmen Pengelola Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Adanya Kesamaan Fungsi dan Peran
6.	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
7.	Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional	Belum adanya standarisasi industri dan profesional yang dapat diadopsi	Kewenangan atas hal ini cenderung lebih banyak pada tingkat pemerintah pusat	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
8.	Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika	Dominasi keberadaan dan pemanfaatan produk non domestik	Terbatasnya produk local	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
9.	Membangun pencitraan positif Negara Indonesia di mata internasional	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Keterbatasan kapasitas sumber daya	Tersedianya media elektronik maupun non elektronik

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Rencana penataan ruang dan wilayah Provinsi Jambi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah tersebut yaitu **“Terwujudnya ruang yang produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan”**. Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat , tengah dan timur,
- b. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
- c. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- d. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
- e. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas meliputi :

- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk

- mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan;
- e. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) adalah serangkaian Analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (pasal 1 UU No 32/2009 tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Pemahaman ini menunjukkan bahwa KLHS merupakan sebuah kajian atau suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya.

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 12016-2021, terdapat 1 (satu) isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu :

1. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Di antara keempat isu pembangunan berkelanjutan di atas, beberapa di antaranya terkait dengan sektor Komunikasi dan Informatika, yaitu :

1. Belum optimalnya kondisi Infrastruktur Faktor utama penyebab masalah infrastruktur ini adalah, karena kenaikan jumlah penduduk, kebutuhan yang semakin meningkat, jangkauan akses ke lokasi tujuan produksi dan industri. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan hilirisasi sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tanpa ketersediaan sarana tersebut akan menyebabkan kurang lancarnya arus barang dan jasa. Khusus untuk daerah Jambi keterbatasan sarana transportasi sangat dirasakan terutama untuk daerah pedesaan. Apalagi daerah Jambi sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, dataran rendah dan pesisir. Kondisi saat ini masih terbatasnya aksesibilitas dari pedesaan terutama sentra produksi pertanian

(khususnya perkebunan) menuju kawasan industri atau pelabuhan. Permasalahannya adalah rendahnya kualitas jalan dan terbatasnya kemampuan jembatan untuk memperlancar arus barang dan jasa. Kondisi tersebut sangat dirasakan bagi pengusaha angkutan jasa hasil perkebunan baik dari sentra produksi (kebun) maupun menuju industri dan pelabuhan terdekat.

2. Daya saing Daerah

Salah satu indikator berkembangnya perekonomian suatu daerah adalah tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang mendukung berkembangnya Daya Saing Daerah. Baik untuk memenuhi kebutuhan manusia maupun untuk kelancaran angkutan barang dan jasa dari sentra produksi ke konsumen/pemakai. Kelancaran angkutan barang dan jasa merupakan faktor utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan industri untuk kelancaran produksi.

Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang hendak dilaksanakan meliputi : kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.

Dalam hal kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Jambi diwujudkan melalui :

1. Kebijakan Pembangunan yang ditekankan pada peningkatan produktivitas dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan mempertahankan lahan yang berfungsi lindung serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
2. Kebijakan Pembangunan yang memperhatikan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga terwujud pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah dan konektivitas antar daerah guna meminimalisir konflik. Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan diatas dilakukan dengan mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Jambi

No.	Aspek Kajian	Kajian KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD
1	2	3	4
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi lahan (kawasan lindung, suaka alam, pesawahan) menjadi peruntukan lain yang berbeda dengan fungsi asalnya. - Konflik pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu sehingga mengganggu keselarasan dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan 	Memasukan pertimbangan lingkungan pada setiap tahap perencanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan aur permukaan yang diakibatkan oleh pencemaran limbah industri	Mendorong pelaksanaan Green Industri
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengelolaan DAS secara terpadu melalui mekanisme jasa lingkungan hulu hilir belum diterapkan secara menyeluruh	Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Ekosistem pesisir dan laut semakin rusak dan terjadi pencurian serta penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	Mendorong pengembangan industri berbasis ikan hasil budi daya dan perairan lainnya
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Masih rendahnya antisipasi aparat pemerintah dalam memahami arti pelestarian, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup untuk menghadapi resiko perubahan iklim	Mendorong pelaksanaan pelestarian, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan tak lepas dari isu strategis yang mempengaruhi kinerja industri dan perdagangan, isu strategis tersebut antara lain :

3.5.1. Isu – isu strategis Provinsi Jambi

Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.

Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi.Selain itu, belum berkembangnya egovernment sistemdan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.

Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan revolusi mental.

3. Predikat Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan.

Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi

4. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.

6. Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

7. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

8. Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada di sektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.

9. **Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs.** Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebunga. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
10. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
11. **Penyelesaian Batas Provinsi Jambidan Provinsi berbatasan** merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.

3.5.2. Isu – isu strategis disektor Komunikasi dan Informatika

Secara umum pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, khususnya pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Jambi sudah baik. Hal ini berdasarkan hasil capaian kinerja layanan selama kurun waktu 2010 - 2015 yang termuat dalam LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Namun ada beberapa hal yang menjadi isu-isu strategis yaitu :

1. Rendahnya kualitas SDM Aparatur pemerintah pada Dinas Kominfo Provinsi Jambi bidang TIK;
2. Pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

belum mencapai titik prioritas pembangunan daerah.

3. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.
4. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal.
5. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan menuju perubahan budaya kerja yang dapat cepat, tepat dan akurat.
6. Minimnya Infrastruktur dan Sumberdaya di Bidang Teknologi dan Informasi.

BABIV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jambi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan Pelayanan Informasi bagi Masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi Masyarakat	Pelayanan Informasi	68	72	82	90	100
		Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik		15	20	25	30	35
2.	Peningkatan Penyebarluasan Informasi Multi Media	Terwujudnya Penyebaran Informasi berbagai Media	Pembentukan KIM Pemberdayaan KIM					
			Spanduk					
			Leaflet	50	60	70	80	90
3.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana TIK dan Pembedayaannya	Terlaksananya Pembangunan Aplikasi dan Website Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Majalah/Tabloid	5	10	15	20	30
			Aplikasi dan Website Milik Pemerintah Daerah					
		Terwujudnya Konektifitas Penggunaan aplikasi dan	Peningkatan Sistem Komunikasi dan Informatika antar OPD	50	65	85	95	100
4.	Peningkatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada Masyarakat	Lembaga Penyiaran	55	65	75	85	95
			Radio	30	40	50	60	70
			Televisi	20	24	34	44	54

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang merupakan wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi, ditetapkanlah strategi pembangunan Komunikasi dan Informatika yang merupakan arah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Strategi Sektor Komunikasi dan Informatika :

- a. Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK
- b. Meningkatkan literasi masyarakat dalam Bidang TIK
- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Jambi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Menerapkan SPSE dilingkup Pemprov. Jambi, instansi vertikal dan Kabupaten/Kota
- e. Meningkatkan kuantitas dan Kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media
- f. Menyelesaikan persoalan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah menetapkan beberapa kebijakan pembangunan untuk lima tahun kedepan yaitu :

- a. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan yang bersertifikasi di Bidang TIK.
- b. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang TIK.

- c. Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jambi.
- d. Meningkatkan ketersediaan data dan keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik Melaksanakan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat.
- e. Melakukan pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Hubungan hirarkis antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dapat dilihat pada table 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1
Hubungan Hirarki antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

Visi :	TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAMBI BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA, BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA		
Misi :	1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang professional di Bidang Teknologi dan Informatika. 2. Meningkatkankerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan teknologi. 3. Meningkatkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika. 4. Meningkatkan kualitas akses informasi dan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dalam kebijakan pembangunan. 5. Meningkatkan pengawasan kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi dengan pemenuhan kebutuhan aplikasi dan pengelolaan informasi publik yang akurat		
Visi	: TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAMBI BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA, BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA		
Misi 1	: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional di Bidang Teknologi dan Informatika		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur bidang TIK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan yang bersertifikasi di Bidang TIK

Misi 2 : Meningkatkan kerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan teknologi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Peran Serta Stakeholder TIK	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan literasi masyarakat dalam Bidang TIK - Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Jambi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang TIK - Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jambi
Misi 3 : Meningkatkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang akuntabel, efisien, efektif, transparan dan berkeadilan	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Menerapkan SPSE dilingkup Pemprov. Jambi , instansi vertikal dan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan secara elektronik

Misi 4 : Meningkatkan kualitas akses informasi dan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dalam kebijakan pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	Tersebar nya informasi berbasis TIK	- Meningkatkan kuantitas dan Kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagaimedia	- Melaksanakan optimalisasi penyebaraninformasi kepadamasyarakat
	Terlaksananya mediasi dan ajudikasi sengketa informasi	- Menyelesaikan permasalahan secara cepat, profesional, transparan danakuntabel	- Melakukan pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasipublic
Misi 5 : Meningkatkan pengawasan kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi dengan pemenuhan kebutuhan aplikasi dan pengelolaan informasi publik yang akurat			
Tuiuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Layanan Online Dalam Penyelenggaraan Berbasis Teknologi dan Komunikasi	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi di Provinsi Jambi	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pendukung Penerapan E-Government di Pemerintah Provinsi Jambi	Melaksanakan Penyelenggaraan Layanan Komunikasi Pendukung Penerapan E-Government di Pemerintah Provinsi Jambi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program/Kegiatan, serta Indikator Kinerja dan Pendanaan yang disusun di dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian didalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya didalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang berfungsi antara lain sebagai institusi penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Komunikasi dan Informatika.

Adapun rencana program/kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Program Rutin/Penunjang antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
2. Penyusunan Laporan Keuangan dan Inventarisasi Aset
3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian
4. Penyusunan Rencana Kerja OPD
5. Monitoring dan Evaluasi Program /Kegiatan OPD

Program Pilihan/Prioritas antara lain :

A. Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan TIK

2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Integrasi Sistem
3. Pengembangan Sarana Informasi yang Dapat Di Akses Masyarakat

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
2. Kegiatan Diseminasi Informasi.
3. Pembinaan dan Pemberdayaan Komunikasi Masyarakat.
4. Kemitraan Penguatan Layanan Komunikasi Publik.
5. Kegiatan penguatan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik
6. Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi.
7. Layanan Media Komunikasi Publik.
8. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik.

C. Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dan Website
2. Pengembangan Sumber Daya di Bidang TIK.
3. Pemberdayaan Informasi TIK.
4. Peningkatan pelayanan e-government, standarisasi dan aplikasi telematika

D. Program Persandian untuk pengamanan informasi

1. Kegiatan penyelenggaraan dan evaluasi keamanan informasi pemerintah daerah.
2. Kegiatan penyelenggaraan operasional persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah

E. Program pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah

1. Kegiatan pengembangan data dan informasi serta sistem data terpadu.
2. Kegiatan penyusunan kompilasi produk statistik sektoral dan analisis data pembangunan.

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021

No.	Program / Kegiatan		Indikator dan Tolak Ukur Kinerja			
			Capaian Program	Output / Keluaran	Outcome / Hasil	Kelompok Sasaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sda	Jumlah surat keluar pertahun	Kelancaran informasi melalui surat menyurat	Surat menyurat
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	sda	Jumlah Sewa Bandwith dan Transponder serta Periode pembayaran rekening listrik, telpon dan Internet	Kelancaran sarana komunikasi dan penunjang	Bandwith, Transponder, Listrik, telpandan Internet
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	sda	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Kelancaran pelayanan administrasi keuangan	Pengelola administrasi keuangan
	04.00	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	sda	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor
	5	Penyediaan Alat Tulis kantor	sda	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kelancaran kegiatan organisasi	Alat tulis kantor
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	sda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran kegiatan organisasi	Barang cetakan dan penggandaan
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya keamanan bekerja bagi aparatur	Peralatan dan perlengkapan kantor
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	sda	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	sda	Jumlah peserta rapat/ pertemuan	Penunjang kelancaran rapat/ pertemuan	Peserta rapat
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	sda	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Terjalannya sinergisitas dan sinkronisasi tugas dengan pihak terkait	Instansi stakeholder, aparaturnya terkait, Diskominfo
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur			
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	sda	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Kelancaran Kegiatan Organisasi	Kendaraan Dinas/Operasional
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	sda	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kelancaran kegiatan organisasi	Peralatan gedung kantor
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	sda	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	Kelancaran kegiatan organisasi	Gedung dan Kantor
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	sda	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kegiatan organisasi	Kendaraan dinas / operasional

No.	Program / Kegiatan		Indikator dan Tolak Ukur Kinerja			
			Capaian Program	Output / Keluaran	Outcome / Hasil	Kelompok Sasaran
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	sda	Jumlah pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	Kelancaran kegiatan organisasi	Peralatan Gedung dan Kantor
	06.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	sda	Jumlah pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kelancaran kegiatan organisasi	Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas
	07.00	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor		Jumlah rehab dan penambahan gedung kantor	Berkurangnya Kerusakan dan Penambahan Gedung Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur			
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	sda	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	Peningkatan penampilan dan motivasi kerja aparatur	Aparatur Diskominfo Provinsi Jambi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya			
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	sda	Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur	Aparatur Diskominfo Prov. Jambi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Nilai SAKIP			
	1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Persentase perencanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Realisasi Capaian - Kinerja Program dan Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen perencanaan Program - Tersedianya Laporan ralisasi kerja 	
6	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		Persentase Penyediaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi			
	1	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan TIK	sda	Jumlah Jaringan dan Aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan.	Tersedianya Jaringan dan Aplikasi	Perangkat Daerah
	2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Integrasi Sistem	sda	Jumlah Informasi yang tersebarluaskan dan Terintegrasinya Sistem	Tersebarluasnya Informasi dan Terintegrasinya Sistem	Perangkat Darerah Provinsi, dan Kab/Kota

No.	Program / Kegiatan		Indikator dan Tolak Ukur Kinerja			
			Capaian Program	Output / Keluaran	Outcome / Hasil	Kelompok Sasaran
	3	Pengembangan Sarana Informasi yang Dapat Di Akses Masyarakat	sda	Jumlah Jaringan Internet yang diakses oleh Masyarakat	Tersedianya Jaringan Internet yang dapat diakses oleh Masyarakat	Masyarakat
7	Program Persandian untuk pengamanan informasi		Meningkatnya Jaminan keamanan Informasi			
	1	Penyelenggaraan operasional persandian untuk informasi milik pemerintah daerah	sda	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Meningkatkan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian	Kalangan pemerintah
	2	Kegiatan penyelenggaraan dan evaluasi keamanan informasi pemerintah daerah.	sda	Tingkat kematangn penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah	Tersedianya dokumenkegiatan pengawasan danevaluasi keamanan informasi pemerintah daerah	Kalangan pemerintah
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Persentase peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
	1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	sda	Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi yang tersebarluaskan.	Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Perangkat Daerah dan Masyarakat
	2	Kegiatan Diseminasi Informasi	sda	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terkoordinir	- Terlaksananya Penyampaian Informasi dan Pesan-pesan Pembangunan Daerah melalui PERTUNRA	- Kelompok Informasi Masyarakat
					- Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai Mitra Pemerintah.	- Kelompok Seni Pertunjukan
	3	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Komunikasi Masyarakat	sda	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik	Aparatur Diskominfo Kab/Kota

No.	Program / Kegiatan		Indikator dan Tolak Ukur Kinerja			
			Capaian Program	Output / Keluaran	Outcome / Hasil	Kelompok Sasaran
	4	Kegiatan Kemitraan Penguatan Layanan Komunikasi Publik	sda	Jumlah Layanan Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi Publik	Terlaksananya Fasilitas Layanan LPSE Provinsi	Masyarakat dan Stakeholder
	5	Kegiatan Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	sda	Penyediaan dukungan administrasi pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Informasi Publik - Terselenggaranya Persidangan Sengketa Informasi - Penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi Nonlitigasi 	
	06.00	Kegiatan Layanan Media Komunikasi Publik	sda	Jumlah layanan media komunikasi publik	Tersedianya layanan Media Komunikasi Publik	Stakeholder
	07.00	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik	sda	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik	
9	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika		Persentase Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika			
	1	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Aplikasi dan Website	sda	Jumlah Aplikasi yang di Bangun dan Dikembangkan.	Tersedianya Aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan	Perangkat Daerah
	2	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya di Bidang TIK	sda	Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Bidang TIK	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur	Aparatur Diskominfo Kab/Kota
	3	Kegiatan Pemberdayaan Informasi TIK	Sda	Jumlah TIK yang di Informasikan	Tersedianya Informasi Bidang TIK	Perangkat Daerah
	04.00	Peningkatan pelayanan e-government, standarisasi dan aplikasi telematika	Sda	Jumlah Pelayanan E – Government, Standarisasi dan Aplikasi Telematika	Tersedianya Pelayanan	Perangkat Daerah
10	Program pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah		Terciptanya Sistem Pemusatan Data			
	1	Kegiatan penyusunan kompilasi produk statistik sektoral dan analisis data pembangunan.	Sda	Terpublikasinya data dan informasi statistik Pembangunan daerah	Terlaksananya layanan data dan Publikasi Pembangunan	Opd dan masyarakat
	2	Pengembangan Data dan Informasi Serta Tersedianya Sistem Data Terpadu	Sda	Tersedianya data dan informasi pembangunan dan Terlaksananya FGD pengelolaan data terpadu Provinsi Jambi	Tersedianya data /informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	Terkoordinirnya data dan informasi pembangunan di Provinsi Jambi

6.2 Rencana Program dan Kegiatan

Indikator kinerja dan pendanaan Satuan kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi disusun dengan memperhatikan Indikator dan Pendanaan yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Jambi, perumusan indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dilakukan dengan mempertimbangkan pada penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang dalam hal ini meliputi 2 (dua) komponen utama, yaitu :

1. Unsur Perencanaan;
2. Unsur Pengendalian.

Kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebagian besar berada di Wilayah Provinsi Jambi sedangkan Indikatif Alokasi Anggaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dengan perincian sebagaimana pada tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2.
Alokasi Pelaksanaan dan Pendanaan Indikatif Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

No.	Program	Alokasi Anggaran (Rp.000)						Total Anggaran (Rp.000)	Lokasi Pelaksanaan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.888.592.000	4.871.001.700	5.705.525.000	6.269.150.000	7.111.125.000	7.466.681.000	36.312.074.700	Provinsi Jambi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.208.280.000	1.030.300.000	4.289.470.000	1.930.865.500	1.825.000.000	1.895.000.000	12.178.915.500	Provinsi Jambi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	78.000.000	105.000.000	150.000.000	225.000.000	230.000.000	245.000.000	1.033.000.000	Provinsi Jambi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	109.800.000	17.281.600	175.000.000	200.000.000	210.000.000	225.000.000	937.081.600	Provinsi Jambi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	675.000.000	260.000.000	266.900.000	307.250.000	1.509.150.000	Provinsi Jambi
6	Program Pengembangan Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.042.090.000	-	-	-	-	-	1.042.090.000	Provinsi Jambi
7	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	991.885.000	-	-	-	-	-	991.885.000	Provinsi Jambi
8	Program Persandian untuk pengamanan Informasi	-	-	-	4.040.200.000	1.185.000.000	1.205.000.000	6.430.200.000	Provinsi Jambi
9	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1.493.558.000	-	-	-	-	-	1.493.558.000	Provinsi Jambi
10	Program pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	-	-	-	4.040.200.000	1.185.000.000	1.205.000.000	6.430.200.000	Provinsi Jambi
11	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	528.585.000	-	-	-	-	-	528.585.000	Provinsi Jambi
12	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	850.726.000	2.303.226.000	1.195.750.000	4.110.000.000	2.061.000.000	10.520.702.000	Provinsi Jambi
13	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	-	2.801.893.000	2.159.000.000	2.100.750.000	2.105.000.000	2.145.450.000	11.312.093.000	Provinsi Jambi
14	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika	-	1.134.927.600	1.750.000.000	1.759.500.000	2.518.000.000	1.764.250.000	8.926.677.600	Provinsi Jambi

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA (OUTCAM E) DAN (OUTPUT)	KOND ISI KINE RJA AWAL RPJM D (TAHU N 1)	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) DAN (OUTPUT)	SKPD PENANGG UNG JAWAB
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase layanan Adminstras i Perkantor			4.871.001.700		4.871.001.700		5.021.827.500		5.958.534.200		7.003.290.000		7.156.090.000		Diskominfo
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terakomodir nya Kelengkapan surat menyurat selama 1 Tahun	1 Tahun	Informasi terpenuhi	1.200.000	Informasi terpenuhi	1.200.000		1.200.000		1.200.000	1458 Surat Menyurat	1.700.000	2000 Surat Menyurat	2.000.000	Terakomodirny a Kelengkapanny a surat menyurat selama 1 Tahun	Diskominfo
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik Dan Air	Pembayaran telepon, air, listrik dan Tersediannya Jaringan Internet	1 Tahun	komunikasi lancar	3.888.000.000	komunika si lancar	3.888.000.000		4.150.000.000		5.089.090.000	12 Bulan dan 500 Megabyte	6.200.090.000	12 Bulan dan 500 Megabyte	6.289.090.000	Pembayaran telepon, air, listrik dan Tersediannya Jaringan Internet	Diskominfo
3	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Kinerja meningkat	405.655.200	Kinerja meningkat	405.655.200		215.214.000		199.586.000					Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan	Diskominfo
4	Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terjagannya kebersihan di Lingkungan kantor	1 Tahun									12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	5.000.000	Terjagannya kebersihan di Lingkungan kantor	Diskominfo
6	Kegiatan Penyediaan Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhnya kebutuhan alat tulis kantor dan Perlengkapan Bahan ID Card.	1 Tahun	70 Surat	79.216.500	100 Surat	79.216.500		190.551.200		148.272.600	57 Jenis dan 2950 Set	150.000.000	59 Jenis dan 3000 Set	160.000.000	Terpenuhnya kebutuhan alat tulis kantor dan Perlengkapan Bahan ID Card.	Diskominfo
7	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Prosentase Pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	Data lengkap	34.430.000	Data lengkap	34.430.000		26.980.000		25.276.300	13 Jenis Cetakan dan Foto Copy	25.000.000	13 Jenis Cetakan dan Foto Copy	26.000.000	Tersediannya barang cetakan dan pengadaan	Diskominfo

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 1)	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terakomodirnya informasi secara akurat	1 Tahun	150 eksemplar	22.500.000	240 eksemplar	22.500.000		23.500.000		43.500.000	10 media	45.000.000	10 media	46.000.000	Terakomodirnya informasi secara akurat	Diskominfo
9	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makan minum Rapat	1 Tahun		75.000.000	99 %	75.000.000		26.000.000		26.000.000	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	28.000.000	Tersediannya makan minum Rapat	Diskominfo
10	Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksannnya Koordinasi di dalam dan di luar Daerah			365.000.000	99 %	365.000.000		388.382.300		425.609.300	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	600.000.000	Terselenggaranya Koordinasi ke dalam dan keluar Daerah	Diskominfo
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat			1.030.300.000	-	1.030.300.000	-	765.903.000	-	1.420.248.200	-	1.465.500.000	-	1.670.000.000	Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat	Diskominfo
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	1 Tahun		296.900.000	99 %	296.900.000		107.623.000		157.024.200	Alat-alat Kelengkapan Kerja	265.000.000	Alat-alat Kelengkapan Kerja	270.000.000	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Diskominfo
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional kantor	1 Tahun		180.400.000	99 %	180.400.000		182.780.000		186.724.000	11 Mobil dan 20 Motor Kendaraan dinas	250.000.000	11 Mobil dan 20 Motor Kendaraan dinas	300.000.000	Tersediannya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional kantor	Diskominfo
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor	Terpenuhnya peralatan gedung kantor	1 Tahun		551.000.000	99 %	551.000.000		475.500.000		475.500.000	Peralatan berfungsi dengan baik	500.500.000	Peralatan berfungsi dengan baik	600.000.000	Terpenuhnya peralatan gedung kantor	Diskominfo
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas				2.000.000	99 %	2.000.000										
5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional									601.000.000		-			Tersediannya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Diskominfo

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 1)	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
																kantor	
6	Kegiatan Pembangunan gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan Gedung Diskominfo Prov. Jambi	1 Tahun									Terlaksananya Gedung Diskominfo dan Data Senter	20.000.000.000	Gedung Diskominfo	30.000.000.000	Gedung Diskominfo	Diskominfo
7	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terseleenggarannya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Tahun									1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	500.000.000	Terseleenggarannya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Diskominfo
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Peresentase Peningkatan Kinerja dan disiplin Aparatur			105.000.000	-	105.000.000	-	50.000.000	-	70.000.000	-	80.000.000	-	90.000.000	Peresentase Peningkatan Kinerja dan disiplin Aparatur	Diskominfo
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian olahraga Dinas beserta pelengkapannya.	Tersediannya pakaian dinas aparatur	1 Tahun	60 Stel	105.000.000	105 stel	105.000.000	140 Stel	50.000.000	150 Stel	70.000.000	100 Stel	80.000.000	100 Stel	90.000.000	Tersediannya pakaian dinas aparatur	Diskominfo
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur yang berkualitas di bidangnya			117.281.600		117.281.600		120.000.000		120.000.000					Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur yang berkualitas di bidangnya	Diskominfo
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Tahun	99 %	117.281.600	100 %	117.281.600	1000 Bh	120.000.000	3000 Bh	120.000.000	Kursus,Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek	130.000.000	Kursus,Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek	140.000.000	Meningkatnya aparatur yang berkualitas dan provesional	Diskominfo
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Nilai Sakip							246.312.000		246.312.000		355.000.000		365.000.000	Persentase Nilai Sakip	Diskominfo

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 1)	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
1	Kegiatan rapat Koordinasi Teknis Bidang Kominfo	Tercapainya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo	1 Tahun						133.784.000							Tercapainya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo	Diskominfo
2	Kegiatan Penyusunan rencana Kerja OPD	Tersusunnya Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Dinas Kominfo	1 Tahun						112.528.000							Tersusunnya Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Dinas Kominfo	Diskominfo
3	Kegiatan Penyusunan Perencanaa dan Pelaporan	Tersusunnya laporan program dan terlaksannya kegiatan rakor bidang Kominfo									246.312.000	10 Jenis laporan dan Rakor Bidang Kominfo	355.000.000	10 Jenis laporan dan Rakor Bidang Kominfo	365.000.000	Tersusunnya laporan program dan terlaksannya kegiatan rakor bidang Kominfo	
6	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Penyediaan sarana teknologi informasi dan telekomunikasi		850.726.000		-	850.726.000	-	2.501.815.300	-	1.891.342.000	-	10.891.000.000	-	11.891.000.000	Persentase Penyediaan sarana teknologi informasi dan telekomunikasi	Diskominfo
1	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terpenuhinya Jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan	1 Tahun	46 OPD dan rumah dinas Jabatan	708.342.000				1.726.369.200		1.891.342.000	48 OPD dan Rumah Dinas Jambatan	10.891.000.000	48 OPD dan Rumah Dinas Jambatan	11.891.000.000	Terpenuhinya Jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan	Diskominfo
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Sandi dan Telekomunikasi	Jumlah OPD yang telah Menggunakan Layanan	1 Tahun	142.384.000	38.57 %	48.57 %	142.384.000	-	245.922.000								Diskominfo

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 1)	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
		Persandian															
3	Kegiatan Penyusunan Kompilasi Produk Statistik Sektoral dan Analisa Data Pembangunan	Tersediannya Informasi Data Statistik Sektoral	1 Tahun	-	-	-	-	-	165.506.000								Diskominfo
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			4.124.213.000		4.124.213.000		2.501.815.300		3.838,00,000		3.838,000,000		4,035,000,000	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Diskominfo
1	Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jambi	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah daerah. Terlaksananya a Koordinasi PPID Se provinsi Jambi. Terlaksananya Rakor IKP. Terlaksananya a Bimtek Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik.	1 Tahun					-	-	-		35 OPD, 11 Kab/Kota dan Media	743.000.000	35 OPD, 11 Kab/Kota dan Media	750.000.000	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID Se provinsi Jambi. Terlaksananya Rakor IKP. Terlaksananya Bimtek Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik.	Diskominfo
2	Kegiatan Pembinaan Opini Publik kepada Masyarakat	Terselenggaranya Informasi Publik kepada Masyarakat. Terlaksananya a BIMTEK Standart	1 Tahun				-		278.636.200	0%	311.108.000	11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	300.000.000	11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	350.000.000	Terselenggaranya a Informasi Publik kepada Masyarakat. Terlaksananya BIMTEK Standart layanan Informasi	Diskominfo

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 1)	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
		layanan Informasi Publik														Publik	
3	Kegiatan Penyerbarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi	Tersebarluasnya informasi Publik melalui Media. Terlaksananya Klarifikasi Berita.	1 Tahun						355.276.000		765.000.000	Media Massa,Media Cetak/Elektronik,Media Onile,Media Sosial dan Media Tradisional	765,000.000	Media Massa,Media Cetak/Elektronik,Media Onile,Media Sosial dan Media Tradisional	785.000.000		Diskominfo
4	Kegiatan pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	Tersebarluasnya Penyelesaian Sengketa Informasi publik dan Terlaksannya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik.		99 %		100 %	441.350.000		310.977.500		249.618.700	11 Kab/Kota Se-Provinsi Jambi	1.425.000.000	11 Kab/Kota Se-Provinsi Jambi	1.500.000.000		
5	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan, Media dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.	Terbentuknya Forum BAKOHUMAS Provinsi Jambi. Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan KIM. Terlaksananya Litensi Media.		99 %		100 %	880.969.400		847.984.900		847.926.400	11 Kab/Kota Se-Provinsi Jambi	650.000.000	11 Kab/Kota Se-Provinsi Jambi	650.000.000		
8	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Teilematika	Persentase Penyediaan Teknologi Informasi			991.885.000	-	1.134.927.600	-	906.345.000	-	1.006.345.000	-	1.141.000.000	-	1.301.000.000		Diskominfo

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 1)	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
		dan Komunikasi															
1	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Website dan Aplikasi	Tersediannya Aplikasi dan Website sesuai kebutuhan OPD	28 Aplikasi 27	43 OPD	1.058.195.600	43 OPD	1.058.195.600	43 aplikasi 36	591.969.000	48 aplikasi 39	691.000.000	48 OPD	1.408.458.344	48 OPD	791.000.000	100%	Diskominfo
2	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya di bidang TIK	Terlaksannnya Bimbingan Teknis Aplikasi dan Website	1 Tahun		76.732.000	100 %	76.732.000		174.438.000		199.438.000	4 BinteK OPD/ terkait	200.000.000	OPD Dinas Terkait	250.000.000		Diskominfo
3	Kegiatan Pemberdayaan TIK	Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain	28 Aplikasi 27 Website						139.938.000		214.938.000	OPD Dinas Terkait	250.000.000	OPD Dinas Terkait	260.000.000		Diskominfo
9	Program Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Jaminan Keamanan Informasi									467.102.800	-	623.429.400	-	725.000.000		Diskominfo
1	Kegiatan Monitoring dan Pelaporan di bidang Keamanan	Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi, dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	N/A	-	-	-	-	-	-			43 OPD dan Kab/Kota Provinsi Jambi.	354,725,000	43 OPD dan Kab/Kota Provinsi Jambi.	425,000,000		Diskominfo
2	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Persandian untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah								467.102.800		2 OPD	349,890,800	2 OPD	500.000.000		Diskominfo

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 1)	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
		menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah															
10	Program pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Terciptanya Sistem Pemusatan data Sektoral	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000.000	-	1.250.000.000	-	2.850.000.000		Diskominfo
1	Kegiatan Pengumpulan, Pengelohan dan Analisa Data Statistik Sektoral.	Terlaksananya Informasi Data Statistik Sektoral	N/A	-	-	-	-	-	-			38 OPD	650.000.000	38 OPD	685.000.000	Terlaksananya Informasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo
2	Kegiatan Diseminasi Layanan dan Publikasi Data Statistik Sektoral.	Terlaksananya Layanan dan Publikasi di Bidang Statistik	N/A	-	-	-	-	-	-		750.000.000	5 Media Cetak, 10 Media Online, Media Elektronik TV dan 2 Radio	600.000.000	5 Media Cetak, 10 Media Online, Media Elektronik TV dan 2 Radio	645.000.000	Terlaksananya Diseminasi layanan dan Publikasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang–bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standard pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan, pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama. Output pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

7.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, maka perlu adanya kerangka

yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Pembangunan dan pengembangan Komunikasi dan Informatika termasuk dalam misi ke-4 Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu “***Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan***”. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah ***Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN***. Dengan sasaran yaitu ***Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah***.

7.2. Indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Rincian indikator sebagaimana tersebut di atas disajikan sebagaimana pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Pemasangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik SKPD	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Pemasangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik Utama	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Aplikasi	48,28%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
4	Terpenuhinya Kebutuhan Website	57%	65%	75%	85%	95%	100%	100%

Pada indikator sasaran menunjukkan persentase kenaikan pada tiap tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebaran informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up to date sehingga peran Dinas Kominfo Provinsi Jambi semakin dituntut menyediakan informasi setiap saat dalam penyebaran informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapaitujuan.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan Program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun kedepan yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Provinsi Jambi sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Jambi. Disamping itu juga Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan Jambi selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi berupa Laporan Kinerja (LKj). Selanjutnya, renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2016 2021.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan

kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Jambi.

Dalam Perjalanannya, Renstra Dinas Kominfo ini telah mengalami beberapa kali revisi sesuai amanat RPJMD tahun 2016-2021 sebagai bentuk upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Perubahan atau revisi Renstra ini diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang TIK melalui penetapan kembali program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra OPD menjadi Rancangan

Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra ini telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dilakukan melalui Renja setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA –per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jambi dalam mencapai sasaran Renstra.

7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Jambi dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Jambi, 2018
KEPALA DINAS KOMINFO

Ir. NURACHMAT HERLAMBAH, MMA
PEMBINA Tk. I
NIP. 19680904 199503 1 001